

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) telah berkembang dari sekadar aktivitas filantropi menjadi komponen strategis yang terintegrasi dalam model bisnis perusahaan modern. Tekanan dari berbagai pemangku kepentingan yang semakin masif, regulasi yang lebih ketat, serta urgensi isu keberlanjutan global mendorong korporasi untuk menempatkan CSR sebagai inti strategi bisnis, bukan sekadar aktivitas sampingan (Awa et al., 2024). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, CSR dilihat sebagai mekanisme utama agar korporasi berkontribusi nyata pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada dimensi sosial dan lingkungan (Seran et al., 2024). Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di pasar modal tidak lagi dapat memisahkan agenda bisnis dari agenda sosial, karena keduanya telah menyatu dalam ekspektasi investor, masyarakat, dan regulator masa kini.

Di Indonesia, urgensi CSR bahkan telah dikodifikasi secara hukum melalui UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang mewajibkan CSR secara regulatif (Fitrianggraeni et al., 2023). Meski demikian, implementasi CSR di Indonesia masih menghadapi tantangan substantif. Berdasarkan penilaian INSTAR 2024 terhadap 100 perusahaan terdaftar di BEI, kualitas pelaporan ESG yang mencerminkan praktik CSR korporasi masih belum merata dan konsisten (INSTAR, 2024). Lebih lanjut,

dari 63 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, terdapat 12 perusahaan yang tidak konsisten menerapkan prinsip ESG selama periode 2019–2022, mengindikasikan bahwa kewajiban regulatif tidak serta merta menghasilkan komitmen CSR yang substantif (Musta'anah, 2024). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pengungkapan CSR oleh korporasi Indonesia merupakan komitmen nyata terhadap stakeholder, ataukah sekadar strategi legitimasi untuk membangun citra di mata publik dan investor?

Relevansi CSR semakin menguat seiring dengan meningkatnya perhatian investor terhadap skor Environmental, Social, and Governance (ESG). Bursa Efek Indonesia (BEI) telah bekerja sama dengan Morningstar Sustainalytics untuk melakukan penilaian ESG atas perusahaan tercatat, dan pada tahun 2023 meluncurkan Indeks ESG Leaders (IDXESGL) yang konstituen utamanya bersumber dari emiten IDX80 (BEI, 2024). Sepanjang tahun 2023, IDXESGL membukukan penguatan sebesar 11% year-to-date, melampaui kinerja IHSG yang hanya tumbuh 6,16% pada periode yang sama, memberikan sinyal bahwa pasar mulai mengapresiasi kinerja CSR secara finansial (Bisnis.com, 2024). Namun demikian, penilaian ESG yang tinggi tidak selalu mencerminkan praktik bisnis yang etis secara menyeluruh. Risiko greenwashing—yakni klaim keberlanjutan yang berlebihan atau tidak didukung praktik nyata—diprediksi meningkat seiring kenaikan kesadaran ESG di Indonesia (Olivia et al., 2024). Fenomena ini memperkuat urgensi untuk meneliti lebih dalam faktor-faktor yang benar-benar mendorong atau menghambat komitmen CSR korporasi, khususnya pada emiten besar di IDX80.

Salah satu variabel yang kuat diduga memengaruhi komitmen CSR korporasi adalah praktik perpajakan. Pajak yang dibayarkan korporasi pada hakikatnya merupakan bentuk redistribusi sumber daya kepada masyarakat, sehingga kepatuhan perpajakan dianggap sebagai manifestasi nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan (Chouaibi et al., 2022). Dalam perspektif Stakeholder Theory, perusahaan yang bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingannya—termasuk negara dan masyarakat luas—seharusnya tidak melakukan penghindaran pajak yang merugikan penerimaan publik (Awa et al., 2024; Dewi et al., 2023). Sejalan dengan itu, Legitimacy Theory menyatakan bahwa perusahaan dengan komitmen CSR tinggi akan cenderung menghindari tax avoidance karena tindakan tersebut bertentangan dengan upaya memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat (Badjuri et al., 2021; Firmansyah et al., 2023).

Namun kenyataannya, praktik tax avoidance di Indonesia justru semakin mengkhawatirkan. Tax avoidance didefinisikan sebagai pengurangan beban pajak melalui pemanfaatan celah regulasi perpajakan yang ada tanpa secara formal melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Wang et al., 2020). Meskipun penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun atau 108,8% dari target APBN (Kementerian Keuangan RI, 2024), tax ratio Indonesia justru mengalami tren penurunan yang konsisten: dari 10,38% pada 2022 menjadi 10,31% pada 2023, 10,08% pada 2024, dan 9,31% pada data sementara akhir 2025 (Kementerian Keuangan RI, 2025). Angka ini jauh di bawah rata-rata ASEAN yang berada di kisaran 15–18% (OECD, 2023). Tren penurunan tax ratio yang konsisten ini mengindikasikan adanya kebocoran penerimaan yang bersumber dari praktik tax

avoidance yang semakin sistematis di sektor korporat (Xu et al., 2022). Kasus nyata tercatat pada PT Adaro Energy Tbk yang pada periode 2009–2017 diduga menjalankan skema transfer pricing melalui anak perusahaannya di Singapura, dengan potensi kerugian pajak bagi Indonesia diperkirakan lebih dari 125 juta dolar AS (Global Witness, 2019).

Di sinilah muncul paradoks yang menjadi inti permasalahan penelitian ini. Secara teoritis, perusahaan yang berkomitmen tinggi terhadap CSR seharusnya tidak melakukan tax avoidance. Namun bukti empiris justru menunjukkan hasil yang kontradiktif. Sejumlah penelitian menemukan bahwa perusahaan dengan skor CSR tinggi justru lebih agresif dalam penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa CSR digunakan sebagai instrumen legitimasi untuk menutupi praktik perpajakan yang agresif (Abid & Dammak, 2022; Xu et al., 2022; Velte, 2025). Sebaliknya, penelitian lain menemukan bahwa ketidakbertanggungjawaban sosial perusahaan justru berkorelasi dengan agresivitas pajak yang lebih tinggi (Chouaibi et al., 2022; Muslim et al., 2023). Kajian sistematis yang mensintesis 37 artikel terindeks Scopus dan WoS pada periode 2017–2022 mengonfirmasi bahwa inkonsistensi temuan ini merupakan problem penelitian yang belum terpecahkan (Firmansyah et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, Pratiwi (2022) menemukan hasil yang tidak konsisten pada emiten BEI, mengisyaratkan bahwa hubungan keduanya sangat bergantung pada faktor kontekstual yang belum banyak dieksplorasi.

Inkonsistensi temuan tersebut mendorong peneliti untuk mengidentifikasi variabel yang dapat memperjelaskan dinamika hubungan tax avoidance–CSR. Salah satu faktor yang secara teoritis kuat adalah kualitas audit. Al-Qatamin &

Salleh (2020) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemampuan auditor untuk secara independen mendeteksi dan melaporkan pelanggaran dalam sistem pelaporan keuangan perusahaan. Kualitas audit yang tinggi—yang biasanya dikaitkan dengan KAP Big Four (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, dan KPMG)—diyakini mampu menekan praktik tax avoidance melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan perusahaan (Payamta et al., 2024; Widuri & Gautama, 2020). Lebih dari sekadar memeriksa kepatuhan akuntansi, auditor berkualitas tinggi juga berfungsi sebagai penjaga reputasi (*reputational gatekeeper*) yang mendorong konsistensi antara pelaporan CSR dengan perilaku bisnis aktual perusahaan, termasuk dalam hal kepatuhan perpajakan (Wulandari et al., 2024). Dengan kata lain, kualitas audit berpotensi tidak hanya memengaruhi tax avoidance secara langsung, tetapi juga memodifikasi seberapa kuat atau lemah hubungan antara tax avoidance dan CSR.

Bukti empiris mendukung urgensi peran moderasi kualitas audit ini. Abid & Dammak (2022) menemukan bahwa kualitas audit secara signifikan memoderasi hubungan antara tax avoidance dan CSR di Prancis: perusahaan yang diaudit oleh auditor berkualitas tinggi cenderung meningkatkan transparansi pengungkapan CSR sebagai respons terhadap risiko reputasi akibat praktik penghindaran pajak. Di Indonesia, Wulandari et al. (2024) menemukan bahwa kualitas audit terbukti memoderasi pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Dakhli (2022) juga mengonfirmasi bahwa kualitas audit memperkuat hubungan antara CSR dan kinerja keuangan perusahaan, menunjukkan peran strategis auditor dalam membentuk konsistensi perilaku korporasi. Namun

demikian, terdapat pula penelitian yang menunjukkan kualitas audit tidak selalu efektif sebagai pemoderasi, bahkan dalam beberapa konteks auditor Big Four dapat memfasilitasi strategi pajak yang lebih canggih melalui penyediaan layanan non-audit (Shafiq et al., 2024; Junaidi et al., 2023). Inkonsistensi ini menegaskan bahwa peran kualitas audit sebagai pemoderasi hubungan tax avoidance–CSR masih merupakan pertanyaan terbuka yang memerlukan pengujian lebih lanjut, terutama dalam konteks pasar modal Indonesia yang memiliki karakteristik penegakan hukum, kematangan pasar, dan budaya pelaporan CSR yang berbeda dari negara-negara maju.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX80, yakni 80 emiten dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar tertinggi di BEI yang mewakili lebih dari 70% total kapitalisasi pasar Indonesia (BEI, 2023). IDX80 dipilih karena emiten-emiten ini merupakan konstituen utama Indeks ESG Leaders, sehingga memiliki skor ESG yang terstandarisasi dan independen untuk pengujian empiris yang lebih akurat dibandingkan self-reported CSR index (BEI, 2024; Abid & Dammak, 2022). Skala bisnis yang besar dan kompleksitas transaksi yang tinggi juga menjadikan emiten IDX80 lebih berpotensi untuk menjalankan strategi tax avoidance yang terstruktur (Wang et al., 2020). Periode pengamatan 2020–2024 dipilih karena mencakup fase tekanan fiskal akibat pandemi COVID-19 hingga pemulihan ekonomi, di mana isu tax avoidance korporat menjadi semakin kritis seiring penurunan tax ratio yang konsisten (OECD, 2023). Meski penelitian Abid & Dammak (2022) telah menghasilkan bukti empiris yang kuat di konteks Prancis, validitas temuan mereka belum diuji di pasar berkembang seperti Indonesia. Peran

audit quality sebagai pemoderasi hubungan tax avoidance–CSR pun belum pernah diuji secara eksplisit pada emiten IDX80 dengan proksi ESG yang terstandarisasi.

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi temuan yang telah diuraikan, masih belum jelas apakah perusahaan yang melakukan tax avoidance memiliki komitmen CSR yang tinggi secara substantif, atau justru menggunakan CSR sebagai alat legitimasi untuk menutupi praktik penghindaran pajak. Lebih lanjut, belum diketahui pula apakah kualitas audit memperkuat atau memperlemah dinamika hubungan tersebut dalam konteks pasar modal Indonesia. Permasalahan inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh tax avoidance terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) dengan audit quality sebagai variabel moderasi, pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX80 di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks IDX80 di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?
2. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks IDX80 di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks IDX80 di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.
2. Menguji dan menganalisis peran kualitas audit sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *tax avoidance* dan kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks IDX80 di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas literatur di bidang akuntansi dan keuangan, khususnya terkait keterkaitan antara praktik penghindaran pajak, tanggung jawab sosial perusahaan, serta kualitas audit dalam konteks pasar modal Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai keterkaitan antara keputusan strategi pajak dan komitmen CSR yang pada akhirnya memengaruhi reputasi dan nilai jangka panjang perusahaan. Bagi investor dan analis, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan tambahan

dalam evaluasi kinerja ESG emiten. Bagi regulator (OJK dan Direktorat Jenderal Pajak), penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan yang mendorong keselarasan antara kepatuhan pajak dan pelaporan keberlanjutan perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena dan urgensi topik penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur penyusunan skripsi.

BAB II – LANDASAN LITERATUR

Bab ini membahas teori yang digunakan sebagai dasar dalam penulisan, konsep yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III – METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian ini akan dijelaskan variabel-variabel yang ada dalam penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan skema analisis yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.

BAB IV – HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis didalamnya dan akan ada tabel-tabel yang digunakan untuk analisis penelitian, hasil analisis penelitian, serta interpretasi data yang telah digunakan dalam penelitian yang sudah dilaksanakan.

BAB V – PENUTUP

Bab ini merangkum kesimpulan dari hasil penelitian, menyampaikan keterbatasan penelitian, dan memberikan saran bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pemangku kepentingan, termasuk implikasi kebijakan dan manajerial.